

EDITORIAL

DNA dalam Politik Luar Negeri

Bolehlah disebut, kajian politik luar negeri merupakan fokus utama studi hubungan internasional. Naskah-naskah yang masuk ke redaksi jurnal ini memberi gambaran sepenuhnya upaya elaborasi dan deliberasi dari akademisi untuk terus memberi tafsir baru tentang politik luar negeri, baik yang melakukan pembacaan terhadap politik luar negeri Indonesia maupun negara-negara lain. Arsitektur politik internasional memang sudah berubah, tetapi masing-masing negara akan tetap mengajukan prinsip-prinsip dasar yang mereka yakini. Politik internasional terus membangun narasi baru, tetapi setiap aktor hubungan internasional – khususnya negara – akan masuk ke dalam narasi itu dengan nilai-nilai dasar yang mereka olah dari sistem keyakinan, sejarah, bahkan bangunan traumatis yang mereka terima di masa silam. Begitulah, setiap negara selalu memiliki “DNA” dalam politik luar negeri mereka. Kita bisa menyebut, “DNA” politik luar negeri Indonesia ada dalam konstitusi kita dan dengan jitu serta visioner dinyatakan dalam prinsip bebas-aktif. Negara-negara lain juga memiliki hal yang sama. Rezim boleh berganti, artikulasi dan eksekusi politik luar negeri juga berubah, tetapi setiap negara, pada ujungnya akan selalu mengembalikan politik luar negeri mereka pada filosofi dan watak dasar mereka.

Mungkin Grotius benar ketika membangun konstataasi bahwa politik internasional dibayangkan sebagai sebuah sistem yang memiliki norma dan setiap negara dibayangkan akan diikat oleh norma tersebut. Tetapi sebagaimana keyakinan kaum di seberangnya, setiap negara pada dasarnya ingin membangun preservasi ekonomi dan politik domestiknya dalam panggung politik global. Tulisan-tulisan dalam edisi ini mencoba mengelaborasi berbagai prinsip-prinsip dasar yang dibawa oleh negara dan aktor non-negara dalam berbagai kesepakatan dan inisiatif internasional.

Studi Hubungan Internasional (di Indonesia) juga semakin ditandai dengan makin menguatnya *cross-cutting* dari sisi alat baca (*tools of analysis*). Hubungan internasional tidak lagi melulu soal perilaku aktor besar, narasi-narasi besar dan juga struktur-struktur besar. Hubungan internasional – sekurang-kurangnya dari banyak naskah yang masuk ke redaksi – mulai menysar pada dunia sosial: tentang perkebunan sawit, tentang pergerakan manusia, tentang turisme dan juga tentang gerakan sosial pada level bawah yang memiliki kelindan dengan isu global. Isu-isu ini dulu dianggap “non-tradisional”, namun rupanya makin hari semakin mengalami proses “IR-ization” karena skope dan relasi yang dikandung dalam isu-isu tersebut terkait dengan persoalan yang kini menjadi pergumulan baru akademisi HI. Apakah ini menjadi petanda bahwa studi HI “boleh membahas apa saja”? Apakah ini juga berarti bahwa studi “boleh menggunakan dan meminjam secara bebas teropong epistemic dari disiplin lainnya”? Pertanyaan-pertanyaan ini sejatinya akan menjadi agenda besar bagi penstudi HI di tanah air untuk menjawabnya.

Sylvia Yazid

Editor in Chief